

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah, pertolongan, dan kekuatan yang Dia berikan, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2023 selesai disusun .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang telah digariskan oleh kebijaksanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan dalam perencanaan jangka pendek dan menengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan cerminan kinerja serta tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2023 yang diharapkan dan digunakan sebagai acuan bagi pejabat struktural dan seluruh karyawan Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Laporan ini kiranya dapat dipergunakan oleh Bapak Walikota Batam sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan saran untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dimasa depan.

Maka dari itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini dan mengharapkan masukan, arahan maupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam di tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Batam, Juni 2024

CAMAT LUBUK BAJA

SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si

Pembina / IV-a

NIP. 19850923 200312 2 001

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3 Aspek Strategik Organisasi.....	12
1.4 Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN RENCANA KINERJA	16
2.1 Rencana Strategik Organisasi	16
2.2 Rencana Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1 Pengukuran Kinerja.....	50
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	51
3.3 Akuntabilitas Keuangan	56
BAB V PENUTUP	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2023 melaporkan capaian kinerja (*performance result*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*). Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini, akan dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan

yang bersifat strategis sedangkan untuk mencapai misi tersebut diatas ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia;
2. Bersinerginya seluruh komponen masyarakat yang ada baik itu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta sektor swasta;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang handal serta kompetitif;
4. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencukupi di tahun yang akan datang.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka keberhasilan capaian indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan visi dan misi Kecamatan Lubuk Baja kedepan dapat terwujud.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Kecamatan Lubuk Baja merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Sebelum terbentuknya Kecamatan Lubuk Baja dimana wilayah Kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan lama yakni Kecamatan Batam Timur. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.

Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu dilakukan penataan kembali, dimana perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik

tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha sebagai konsekuensi tersebut maka secara defakto menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan. sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana konsekuensinya pelayanan pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak kecamatan dan kelurahan sangat variatif.

Berdasarkan kajian tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien dan untuk memperkecil rentang kendali maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Kecamatan Lubuk Baja membawahi 5 Kelurahan, Kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam adalah :

1. Kelurahan Lubuk Baja Kota

Kelurahan Lubuk Baja Kota terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Lubuk Baja Kota tidak dimekarkan dan termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Lubuk Baja Kota dapat diartikan Lubuk artinya Sungai yang dalam, Baja artinya Baje atau pupuk, Kota yaitu letak/posisi di tengah-tengah Kota. Luas wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota 1,459 Km². Kelurahan Lubuk Baja Kota merupakan wilayah perkotaan yang dikenal dengan nama Nagoya yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dengan jumlah Penduduk tetap 9.121 jiwa berdasarkan

data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam yang mayoritasnya adalah WNI Keturunan Tionghoa.

2. Kelurahan Batu Selicin

Kelurahan Batu Selicin terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997 dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Batu Selicin termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota 1,331 Km² dengan jumlah penduduk 14.210 jiwa

3. Kelurahan Baloi Indah

Kelurahan Baloi Indah sendiri adalah pecahan dari Kelurahan Batu Selicin yang kemudian menjadi Kelurahan Pangkalan Petai pada tahun 1997 dan bergantian nama menjadi Kelurahan Baloi Indah pada Bulan Juni 2006 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam. Kelurahan Baloi Indah mempunyai Luas 3,519 Km², dari gambaran umum diatas Kelurahan Baloi Indah memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.399 jiwa

4. Kelurahan Kampung Pelita

Kelurahan Kampung Pelita terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997. Kelurahan Kampung Pelita Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Kampung Pelita termasuk

salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Kampung Pelita 1,393 Km² dengan jumlah penduduk 5.389 jiwa.

5. Kelurahan Tanjung Uma

Kelurahan Tanjung Uma terbentuk pada tanggal 18 Mei 1998 bersamaan dengan dimekarkannya Kotamadya Batam dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau Nomor 439 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1997. Kelurahan Tanjung Uma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Kelurahan Tanjung Uma termasuk salah satu Kelurahan dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Luas wilayah Kelurahan Tanjung Uma 3,724 Km² dengan jumlah penduduk 18.537 jiwa.

Kecamatan Lubuk Baja merupakan salah satu kecamatan yang dimekarkan sebagaimana dengan Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kotamadya Batam ditetapkan menjadi Kota Otonom dengan Pemekaran Wilayah dari tiga Kecamatan menjadi delapan kecamatan dan Sebagaimana Peraturan Darah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam yang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Batam, dengan demikian Kecamatan Lubuk Baja harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Lubuk Baja diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian misi tersebut.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

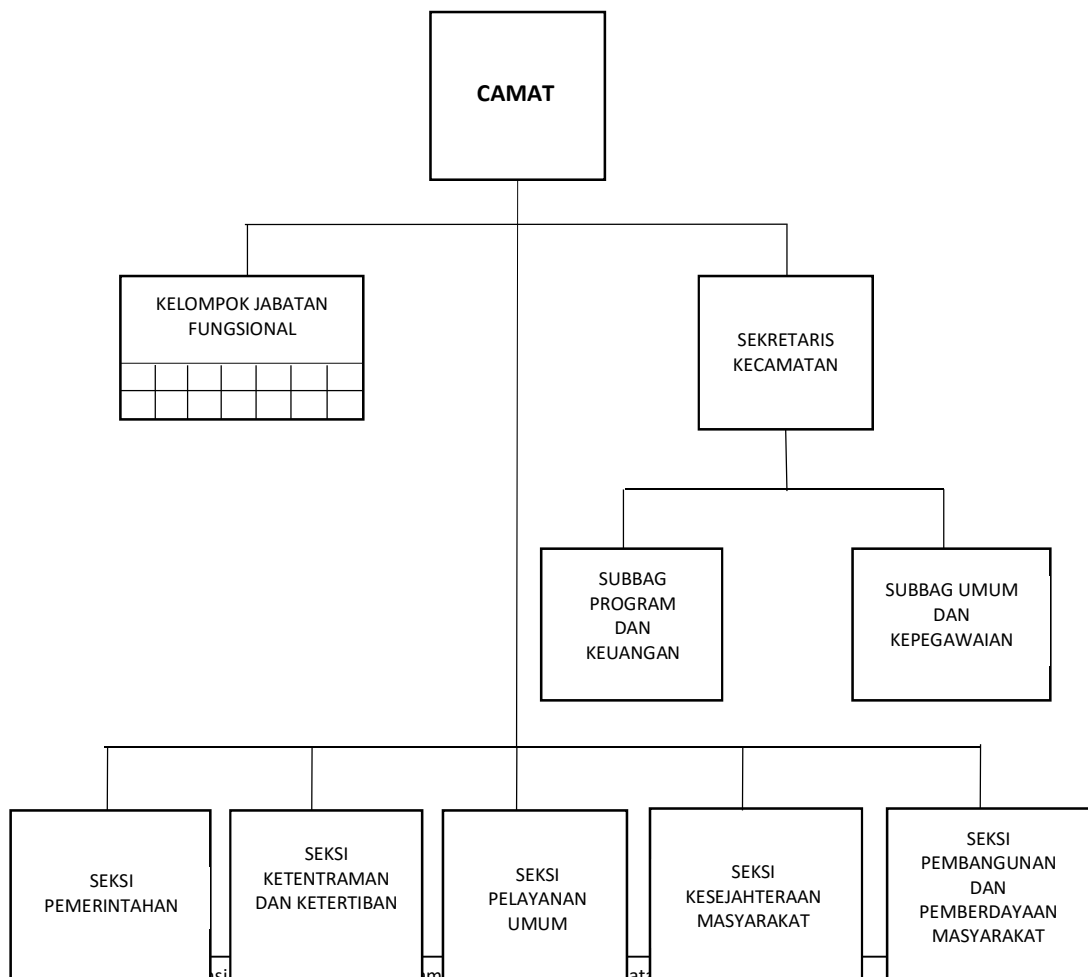
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan Kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- b. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas pada setiap Seksi.
- c. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
 3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
 4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
 5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas – tugas pada masing – masing unit kecamatan;

6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

d. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris terdiri dari:

- i. Sub Bagian Program dan Keuangan
- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program dan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Seksi Pemerintahan

e. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

f. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;

3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
4. Seksi Pelayanan Umum
- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
 - 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
 - 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
 - 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.
- 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Aspek Strategik Organisasi

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada saat ini berjumlah 105 orang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 50 orang, PPPK berjumlah 6 orang dan Pegawai Kontrak /

Tidak Tetap (Honor) berjumlah 26 dan Tenaga Satgas Persampahan 23 orang.

Tabel II.1

Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja Menurut Golongan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Menurut golongan					PPPK	Jumlah
		Honor	I	II	III	IV		
1	Kecamatan Lubuk Baja	37	-	4	14	1	6	62
2	Lubuk Baja Kota	2	-	-	6	-	-	8
3	Kampung Pelita	3	-	1	5	-	-	9
4	Batu Selicin	1	-	-	6	-	-	7
5	Baloi Indah	2	-	1	6	-	-	9
6	Tanjung uma	4	-	1	5	-	-	10
Jumlah		49	-	7	41	1	6	105

Dilihat dari latar belakang pendidikan Aparatur Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang ada saat ini belum cukup untuk melakukan fungsi dan tugas kecamatan, namun perlu diadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Sumber Daya Kecamatan Lubuk Baja Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Menurut Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	
1	Kecamatan Lubuk Baja	-	1	34	5	1	18	3	62
2	Lubuk Baja Kota	-	-	2	-	-	6	-	8
3	Kampung Pelita	-	-	3	1	-	5	-	9
4	Batu Selicin	-	-	1	-	-	6	-	7
5	Baloi Indah	-	-	3	-	-	6	0	9
6	Tanjung Uma	1	-	3	1	-	5	-	10
Jumlah		1	1	46	7	1	46	3	105

Pada sebuah organisasi maka sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menggerakkan roda organisasi, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, niscaya organisasi akan lambat dan stagnan. Kondisi saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam telah memadai dan mencukupi. Namun bila dilihat dari kualitasnya nampaknya masih perlu ditingkatkan.

1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Menjelaskan gambaran umum dari OPD Kecamatan Lubuk Baja termasuk landasan hukum dibentuknya OPD Kecamatan Lubuk Baja sampai dengan Kelurahan

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Menjelaskan Tugas – Tugas dan Fungsi yang menjadi kewenangan Kecamatan Lubuk Baja serta susunan organisasi Kecamatan Lubuk Baja lengkap dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

1.3 Aspek Strategik Organisasi

Menjelaskan kekuatan berupa jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Lubuk Baja dalam rangka pencapaian Sasaran dan Tujuan strategik yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lubuk Baja

1.4 Sistematika Penyajian

Menjelaskan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II RENCANA STRATEGIK

2.1 Rencana Strategik Organisasi

Menguraikan Rencana Strategik Kecamatan Lubuk Baja berupa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, indikator kinerja kelompok sasaran serta Program Kecamatan Lubuk Baja

2.2 Rencana Kinerja

Menguraikan Rencana Strategik Organisasi berupa jumlah anggaran kegiatan pada tahun 2023 dengan 5 program dan 29 kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Uraian tentang pengukuran target indikator kinerja dan capaian kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Baja

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja

Mengukur target indikator kinerja dan capaian kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Baja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Mengukur target anggaran dengan realisasi anggaran kegiatan Kecamatan Lubuk Baja

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIK

2.1. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lubuk Baja mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, mencakup Visi, Misi, tujuan, Strategik, Sasaran, program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

A. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021–2026:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Visi di atas mendudukan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor geografis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi” sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang

(perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam. Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera memberikan pemahaman sebagai berikut:

Bandar dunia : mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".

Madani : bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang religius.

Sejahtera: mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

Modern: mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai

dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2021-2026, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi Kedua : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi Ketiga : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi Keempat : Melanjutkan Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland untuk Pemerataan dan sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program program pembangunan daerah dimana Kecamatan Lubuk Baja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang** dan misi ke 5 (lima) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan**

Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah pada visi dan misi yang telah ditentukan sehingga menjadi suatu kesatuan yang harus terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana strategis (Renstra) periode 5 (lima) tahun, maka Kecamatan Lubuk Baja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026.

Kecamatan Lubuk Baja termasuk pada Misi 2 (dua) dan misi ke 5 (lima). Berdasarkan kedua misi yang diampu oleh Kecamatan Lubuk Baja maka dirumuskan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi-2 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Misi - 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Arsi dan Nyaman Sesuai Tata Ruang.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
- Sasaran : Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan

Berdasarkan misi -5(lima) ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi – 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk Efektifitas pembangunan Kecamatan Lubuk Baja dalam pengembangan yang akan dikembangkan dan menjadikan perhatian utama dalam pembangunan lima tahun kedepan dimana untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong keberhasilan akan ditentukan oleh arah kebijakan. Untuk pencapaian dalam meningkatkan kinerja dan mengarah pada visi dan misi maka arah kebijakan Kecamatan Lubuk Baja yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana, petugas serta administrasi Pengelolaan sampah;
2. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup dan layak;
3. Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan;

4. Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi dalam proses perencanaan, pengusulan prioritas pembangunan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana permukiman serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya;

Kebijakan di atas menjadi solusi dan semangat pembangunan Kecamatan Lubuk Baja berada dibawah payung “Iman dan Taqwa” sehingga setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta patuh kepada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, maka pemerintah perlu membuat langkah untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan terintegrasi antara keahlian Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan yang strategis.

Dengan menyusun perencanaan strategik yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan kemudian menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, maka diharapkan Kecamatan Lubuk Baja dapat secara tepat menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan, dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lubuk Baja

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
Misi Kota Batam yang Diampu Kecamatan Lubuk Baja:			
Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Mengoptimalkan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS	Menyediakan sarana dan prasarana, petugas serta administrasi pengelolaan sampah
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur melalui peningkatan profesionalisme	Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup dan layak
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan

	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi dalam proses perencanaan, pengusulan prioritas pembangunan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman serta pendidikan dan keterampilan masyarakat dan keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana permukiman serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya

D. PROGRAM INSTANSI

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Batam yang diampu oleh Kecamatan Lubuk Baja, maka pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 5 (lima) program yang direncanakan dan mengacu pada Program RPJMD Walikota Batam Tahun 2021-2026 yang terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

E. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program pengelolaan Persampahan, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdapat di Kecamatan Lubuk Baja dan di 5 (lima) Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja, kegiatan dan sub kegiatannya terdiri dari :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Lubuk Baja), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Baloi Indah), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Tanjung Uma) terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Kampung Pelita), terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Batu Selicin), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Baloi Indah), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Tanjung Uma), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Lubuk Baja Kota) terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Kp. Pelita), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Batu Selicin), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 15. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja), terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Baloi Indah), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Tanjung Uma), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Lubuk Baja Kota), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

19. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Kampung Pelita), terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Batu Selicin), terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari :

- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Baloi Indah), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Tanjung Uma), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Lubuk Baja Kota), terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Kampung Pelita), terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Batu Selicin), terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

terdiri dari :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. INDIKATOR PROGRAM DAN KELOMPOK SASARAN

Adapun indikator kinerja dari program (Outcome) berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Program 1 : Program Pengelolaan Persampahan

Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Pengangkutan Sampah yang Tidak Tuntas	Persentase	18%

Program 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Pegawai Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Lubuk Baja	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100%

Program 3: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	Persentase	100%

Program 4: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
RT,RW , LPM dan Masyarakat di Lingkungan	1. Persentase RT/RW/LPM aktif, 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	1. 100% 2. 100%

Kecamatan Lubuk Baja			
-------------------------	--	--	--

Pogram 5 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	Persentase	1. 10% 2. 100%

2. 2 RENCANA KINERJA

Pada tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kota Batam sebesar Rp26.171.505.908,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah suatu perwujudan kewajiban Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public accountability*) keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik satu tahun (*annual accountability*). Penyusunan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja dimulai dengan perencanaan kemudian pelaksanaan dan selanjutnya pengendalian (input, proses, output dan outcome) dengan menetapkan indikator kinerja, menyusun sasaran dan kemudian mengevaluasi kinerja terhadap kegiatan dan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai sarana penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama. Pengukuran kinerja mencakup penetapan kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi capaiannya, membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*) dan membandingkan realisasi dengan standar.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai Capaian kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada tahun 2022 dilihat dari kinerja capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam, merupakan Sasaran 1 dari Tujuan 1, dimaksudkan untuk mewujudkan Misi Kedua yaitu **Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang**, sasaran ini meliputi 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
2. Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana, merupakan sasaran 2 dari tujuan 2 dimaksudkan untuk mewujudkan Misi Kelima yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat**, sasaran ini meliputi 2 (dua) program, 21 (dua) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan.
3. Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan merupakan sasaran 3 dari tujuan 2, dimaksudkan untuk mewujudkan Misi Kelima yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat**, sasaran ini meliputi 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam telah menetapkan 5 (lima) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Program I

Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja dari program ini adalah Persentase Pengangkutan Sampah yang Tidak Tuntas khususnya di Kecamatan Lubuk Baja dengan target 18% dan realisasi sebesar

18% , artinya pencapaian kinerja 100%

Kegiatan Operasional Pelayanan sampah telah menghasilkan pelayanan pengangkutan sampah secara optimal dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di lima wilayah Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Lubuk Baja

Program II

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja dari program ini adalah Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, artinya pencapaian kinerja 100%.

Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Lubuk Baja dan di 5 (lima) kelurahan (Tanjung Uma, Baloi Indah, Batu Selicin, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita) yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjiilidan, Pajak daerah dan Retribusi daerah, dan tersedianya pemeliharaan dan belanja modal selama satu tahun.

Dengan tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten selama satu tahun pada tahun anggaran 2022 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

Program III

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, artinya pencapaian kinerja 100%

Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal bihalal, HUT RI dan Jambore PKK. Pada tahun 2022 khususnya Kota Batam terdampak terkait dengan penyebaran pandemi *Covid-19* dimana kegiatan yang bisa dilaksanakan berupa MTQ/STQ dan Safari Ramadhan, untuk kegiatan Halal Bihalal, HUT RI dan Jambore PKK batal untuk dilaksanakan. Kegiatan ini biasa melibatkan masyarakat langsung dan tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT, RW, LPM, yang memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis) dan rasa kebangsaan di Kecamatan Lubuk Baja yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya pembangunan di Kecamatan Lubuk Baja khususnya dan di Kota Batam umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Program IV

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja dari program ini adalah Persentase RT/RW/LPM aktif dan Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD. Persentase Partisipasi Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam

pembangunan dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100 %, artinya pencapaian kinerja 100%

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan serta pembinaan RT / RW dan LPM merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan (*Bottom-Up*), merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan langsung tokoh RT, RW, LPM memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat, karena yang di rumuskan di usulan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

Program V

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja dari program ini adalah Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan dan Persentase Warga yang Berdaya dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% , artinya pencapaian kinerja 100%

Terlaksananya Program PSPK berupa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) di 5 (lima) kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Baloi Indah

- Semenisasi Jalan Lingkungan 11 unit/paket
- Batu Miring 1 unit/paket
- Drainase 1 unit/paket

Jumlah 13 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

2. Kelurahan Tanjung Uma

- Semenisasi Jalan Lingkungan 6 unit/paket
- Drainase 7 unit/paket
- Jerambah Beton 6 unit/paket

Jumlah 19 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

3. Kelurahan Lubuk Baja Kota

- Semenisasi Jalan Lingkungan 7 unit/paket
- Drainase 1 unit/paket
- Gedung Serbaguna 1 unit/paket

Jumlah 9 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

4. Kelurahan Kampung Pelita

- Semenisasi Jalan Lingkungan 1 unit/paket
- Batu Miring 4 unit/paket
- Gedung Serbaguna 2 unit/paket

Jumlah 7 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

5. Kelurahan Batu Selicin

- Semenisasi Jalan Lingkungan, 6 unit/paket
- Batu Miring 1 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket
- Gedung Serbaguna 3 unit/paket

Jumlah 12 unit/paket, 10 unit/paket dapat terlaksana, dan 2 unit/paket tidak dapat terlaksana karena kendala teknis dan lahan.

Hasil dari kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ini berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di lingkungan perumahan. Sejak dilaksanakan program PSPK ini jalan di lingkungan masyarakat menjadi tertata rapi, bersih dan asri.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2022 masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Lubuk Baja melaksanakan 5 (lima) Program, 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Batam yang mana pada APBD Murni sebesar Rp29.103.965.107,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Rupiah), tetapi kemudian mengalami pengurangan pada Anggaran Perubahan (APBD-P)

Tahun 2022 menjadi Rp26.171.505.908,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) dengan jumlah Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.591.954.385,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 94%. Capaian realisasi belanja sub kegiatan yang tertinggi sebesar 100% dan terendah sebesar 0% yang terdapat pada satu sub kegiatan yang disebabkan karena tidak adanya perjalanan dinas luar daerah. Capaian realisasi kinerja Kecamatan Lubuk Baja TA 2022 dapat dijelaskan dengan rinci pada tabel berikut :

**RINCIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM TAHUN 2023**

SASARA N	INDIKA TOR SASARA N	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEG/SUB KEGIATAN	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2023	
					TARGET	Rp
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Terlaks ananya Pelayan an Pengang kutan Sampah di Kecama tan	Persent ase Pelayan an Pengang kutan Sampah di Kecama tan				82%	
		PROGRAM PENGELO LAAN PERSAMP AHAN	Persentase pengangkut an sampah yang tidak tuntas	20%	18%	1.255.5 57.145, 00
		Kegiatan Pengelolaa n Sampah	Persentase Pengangkut an Sampah		82%	1.255.5 57.145, 00

		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	N/A	8583 Ton / Tahun	1.255.557.145,00
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana				100%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	14.439.199.562,00

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	10.865.225.402,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 Orang	10.764.575.402,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	100.650.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	326.466.410,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	5.436.500,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	5 Paket	102.592.910,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	2 Paket	43.780.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	62.041.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	1 Dokumen	7.200.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	105.416.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kelurahan Baloi Indah)	100%	100%	127.010.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	N/A	1 Paket	3.206.000,00

		erangan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan			
		Sub Kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	41.806.0 30,00
		Sub Kegiatan Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	30.450.0 00,00
		Sub Kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	N/A	2 Paket	16.397.0 00,00
		Sub Kegiatan Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	N/A	1 Dokumen	3.600.00 0,00
		Sub Kegiatan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	31.551.0 00,00

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kelurahan Tanjung Uma)	100%	100%	127.010.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	3.206.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	41.806.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	30.450.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	16.397.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	1 Dokumen	3.600.000,00

		Perundang-undangan	yang Disediakan			
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	31.551.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kelurahan Lubuk Baja Kota)	100%	100%	127.010.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	3.206.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	41.806.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	N/A	4 Paket	30.450.000,00

		Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	16.397.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	1 Dokumen	3.600.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	31.551.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kelurahan Kampung Pelita)	100%	100%	127.010.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	N/A	1 Paket	3.206.000,00

		Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	41.806.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	30.450.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	16.397.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	1 Dokumen	3.600.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	Laporan	31.551.000,00

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kelurahan Batu Selicin)	100%	100%	127.010.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 Paket	3.206.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	3 Paket	41.806.030,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	30.450.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	16.397.000,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	N/A	1 Dokumen	3.600.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	31.551.000,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	385.164.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2 Paket	62.328.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	20 Unit	322.836.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	1.419.595.200,00

			(Kecamatan Lubuk Baja)			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	198.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	1.221.595.200,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kelurahan Baloi Indah)	100%	100%	140.379.680,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	58.800.000,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	81.579.680,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kelurahan Tanjung Uma)	100%	100%	121.179.680,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	39.600.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	81.579.680,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kelurahan	100%	100%	123.579.680,00

			Lubuk Baja Kota)			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	42.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	81.579.680,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kelurahan Kampung Pelita)	100%	100%	123.579.680,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	42.000.000,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	81.579.680,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kelurahan Batu Selicin)	100%	100%	121.179.680,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	39.600.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	81.579.680,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	100%	100%	155.450.000,00

			(Kecamatan Lubuk Baja)			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	9 Unit	85.370.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	78 Unit	52.580.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	17.500.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/			

		Bangunan Lainnya	Direhabilitasi			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi (Kelurahan Baloi Indah)	100%	100%	4.470.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1 Unit	3.870.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	1 Unit	600.000,00

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi (Kelurahan Tanjung Uma)	100%	100%	4.470.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	Unit	3.870.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	Unit	600.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	100%	100%	4.470.000,00

			(Kelurahan Lubuk Baja Kota)			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1 Unit	3.870.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	600.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi (Kelurahan Kampung Pelita)	100%	100%	4.470.000,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1 Unit	3.870.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	600.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi (Kelurahan Batu Selicin)	100%	100%	4.470.000,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	1 Unit	3.870.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1 Unit	600.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	1.269.675.500,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100%	100%	1.269.675.500,00

		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	5650 Orang	377.190.000,00
--	--	--	---	-----	------------	----------------

		Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	N/A	7084 Orang	864.797.500,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	2 Dokumen	27.688.000,00
Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan				100%	
		PROGRAM PENYELE	1. Persentase	100%	100%	1.714.8

		NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	RT/RW/LP M aktif			71.875, 00
			2. Persentase usulan yang ditindaklan juti ke forum OPD	100%	100%	
		Kegiatan Koordinas i Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	100%	100%	1.714.8 71.875, 00
		Sub Kegiatan Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>N/A</i>	2 Laporan	136.871. 875,00
		Sub Kegiatan Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	<i>N/A</i>	12 Dokumen	1.578.00 0.000,00

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	40%	10%	10.424. 661.025 ,00
			2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Baloi Indah)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	100%	100%	2.404.0 76.800, 00
			2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	40%	10%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	7 Lembaga	16.495.0 00,00

		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	17 Unit	2.348.531.800,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	3 Pokmas dan Ormas	39.050.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tanjung Uma)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	100%	100%	2.486.276.025,00
			2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	40%	10%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	N/A	7 Lembaga	16.495.000,00

		Pembangunan di Kelurahan	an di Kelurahan			
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	21 Unit	2.430.431.025,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	3 Pokmas dan Ormas	39.350.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lubuk Baja Kota)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	100%	100%	1.841.773.400,00
			2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	40%	10%	

		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	7 Lembaga	16.495.000,00
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	11 Unit	1.786.228.400,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	3 Pokmas dan Ormas	39.050.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kampung Pelita)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	100%	100%	1.133.455.000,00
			2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke	40%	10%	

			Musrenbang Kecamatan			
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	7 Lembaga	16.495.000,00
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	9 Unit	1.077.910.000,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	3 Pokmas dan Ormas	39.050.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Batu Selicin)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	100%	100%	2.559.079.800,00

			2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	40%	10%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A	7 Lembaga	16.495.000,00
		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	16 Unit	2.503.195.800,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	3 Pokmas dan Ormas	39.389.000,00
						29.103.965.107,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pemerintahan Kecamatan Lubuk Baja diharapkan dapat memberi gambaran sekilas dan informasi yang valid tentang Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, Pengelolaan persampahan, peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman serta masalah-masalah yang ada di Kecamatan Lubuk Baja.

LKjIP sebagai dokumen evaluasi dari pelaksanaan (capaian) Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja agar dapat diketahui sejauh mana yang sudah tercapai dan berjalan sesuai dengan target kinerja tahunan .

Akhirnya melalui LKjIP ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya pembangunan serta pelayanan yang prima kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Lubuk Baja khususnya dan Kota Batam umumnya, dengan ini diharapkan tercapai pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan selanjutnya dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik.

Kemudian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja ini juga dijadikan barometer dan bahan acuan kemajuan Kecamatan Baja dalam rangka optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia.

Keberhasilan Kecamatan Lubuk Baja tidak terlepas dari bersinerginya instansi/penyelenggara pemerintahan serta partisipasi aktif dari masyarakat, dari itu kami mohon masukan yang positif dan konstruktif dari semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Lubuk Baja kedepan yang lebih baik.